

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyono Hari. 2006. *Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi, Agustus 2006.
- Adisasmita Rahardjo. *Manajemen Pemerintah Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama Yogyakarta : BFEE.
- Berti. 2015. *Porphyromonas gingivalis dominan periodontitis (in vitro)*. Jurnal Ilmiah, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Damang. 2011. *Pendapatan Asli Daerah, Artikel*. <http://www.pendapatan-asli-daerah-negara-hukum.com>.
- Frediyanto, Yanuar, 2010. *Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah Kebijakan Otonomi Daerah*.
- Gade. 2005. *Teory Akuntansi*. Edisi pertama. Jakarta : Almahira.
- Halim. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama, Jakarta : Salemba Empat.
- _____. 2003. *Analisis Investasi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hirawan, Susiati B. 2016. *Analisis tentang Keuangan Daerah di Indonesia*. EKI, Vol. XXXIV No. 1, 94 – 95.
- Kabupaten Jeneponto. 2019. *Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto*.
- _____. 2019. *Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jeneponto*.
- _____. 2019. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto*.
- _____. 2019. *Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jeneponto*.
- _____. 2019. *Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto*.

- Kaho, Josef Riwo. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia; Identifikasi beberapa Faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Penerbit Rajawali Press. Jakarta.
- _____. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Koontz, Harold, Cyril. 2002. *Manajemen*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta : UPP- AMP YKPN.
- Mahfud. 2001. MD. *Hukum dan Pilar- Pilar Demokrasi*. Yogyakarta : Gama Media.
- Mardiasmo. 2000. *Perpajakan Indonesia Revisi 2000*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- _____. 2001. *Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja. Pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah*. Jurnal Bisnis.
- _____. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit : Andi. Yogyakarta.
- _____. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2009*. Penerbit : Andi. Yogyakarta.
- _____. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Penerbit : Andi. Yogyakarta.
- Munir. 2004. *Analisis Transformasi Struktural dan Basis Ekonomi Daerah di Kabupaten Karanganyar*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan UNS : Juli. Vol 1, No 1, Hal. 15- 27.
- Oates. 2002. *Modification of Cassava Starch*. Paper of X International Starch Convention. Cracow, Poland.
- Republik Indonesia. *Bappenas 2003 tentang Peta Kemampuan Keuangan Provinsi dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan Alas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- _____. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan pmendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua*.

- _____. *Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2000 tentang informasi keuangan daerah.*
- _____. *Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom.*
- _____. *Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- _____. *Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2002 tentang retribusi daerah.*
- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Untuk Tujuan Pelaporan Keuangan*
- _____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.*
- _____. *Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 106 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi.*
- _____. *Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945.*
- _____. *Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 34 Tahun 2000.*
- _____. *Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.*
- _____. *Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015.*
- _____. *Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*
- _____. *Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*
- _____. *Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeirntah Daerah.*
- _____. *Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 retribusi daerah.*

- Revrisond. 2000. *"Ekonomi Kerakyatan"*, MBK Panji Masyarakat. Jakarta 9 September 1999a, *"Dari Ekonomi Rakyat ke Ekonomi Kerakyatan"*, Hu Jawa Post, Surabaya 25 Januari 1999b, *Menuju Politik Pembangunan Kerakyatan*", Jurnal Bisnis dan Ekonomi Politik, Indef, Jakarta, Vol 3 Nomor 2 Tahun 2000.
- Ridwan. 2009. *Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi dan Komunikasi dengan Pemanfaatan Software Delphi untuk meningkatkan minat belajar siswa*. Surakarta, FKIP UMS.
- Sasana. 2006. *Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. Dinamika Pembanguna Vol. 3 No. 2/ Desember 2006 : 145- 170.
- _____. 2011. *Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dalam era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), 18(1), hal 46-58.
- Saragih. Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sarundajang, SH. 2001. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Shah, Anwar dan DEC, 2005. *A fiscal needs approach to equalization transfers in a decentralized federation*.
- Siagian. Sondang. P. 2008. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Sugianto. 2013. *Model- Model Pembelajaran Inovatif*. Surakarta : Yuma Pustaka.
- Sulawesi Selatan. 2019. *Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan*.
- Sunamo Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik, untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Andi : Yogyakarta.
- Sutrisno. 2001. *Retribusi Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Syaukani, H. R. 2005. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

The Liang Gie. 2010. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Gunung Agung: Jakarta.

World Bank (1997). *World Development Report : The State in a Changing World*. New York: The World Bank.